

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. PKPT Tahun 2019 telah dibahas secara internal pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat pada saat diselenggarakannya RAKORWASDA tingkat provinsi pada tanggal 7 s.d 9 November 2018 di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kota Singkawang, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan PKPT diucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam mendorong terwujudnya *Good Governance dan Clean Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Desember 2018



SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670717 198803 2 010

B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan PKPT

1. Maksud

Penyusunan PKPT dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pengawasan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan PKPT Tahun 2019 adalah :

- a. Menciptakan sinergi pelaksanaan pengawasan dan menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Aparat Pengawas Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
- b. Menetapkan jadwal dan objek pemeriksaan, serta kebijakan/sasaran prioritas kegiatan pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan Kota Singkawang.

II. KEBIJAKAN DAN PKPT INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG

A. Kebijakan Pengawasan

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada Tahun 2018 merupakan kelanjutan dari arah kebijakan tahun sebelumnya, dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Singkawang 2018 – 2022, selanjutnya dalam mengimplementasikan arah kebijakan tersebut pada tahun 2019 perlu mereviu pelaksanaan program kegiatan 2018. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan, dipandang perlu untuk mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah. Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah dalam rangka mengkaitkan fungsi Inspektorat sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) atas penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Wujud kebijakan pengawasan ini lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga antar APIP terkait dapat memahami sepenuhnya kegiatan yang dituangkan/dirumuskan dalam PKPT yang merupakan acuan bersama seperti yang diamanatkan, baik dalam hal sasaran pengawasan jadwal/waktu pelaksanaan pengawasan maupun jenis pengawasan yang diharapkan dapat terlaksana secara optimal.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang juga memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan mengacu pada kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Singkawang melalui :

1. Pengawasan Umum dengan sasaran :
 - a. perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. pajak dan retribusi daerah
 - c. hibah dan bantuan sosial;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. perizinan dan non perizinan; dan
 - f. perjalanan dinas.
2. Pengawasan Teknis, dengan fokus capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur, kriteria urusan pemerintahan meliputi :
 - a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan
 - b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan
 - c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - f. Urusan pemerintahan bidang sosial
 - g. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
 - h. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - i. Urusan pemerintahan bidang pangan
 - j. Urusan pemerintahan bidang Pertanahan
 - k. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
 - l. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - m. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - n. Urusan pemerintahan bidang Perhubungan
 - o. Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika
 - p. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - q. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal
 - r. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga

- s. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
- t. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
- u. Urusan pemerintahan bidang Kearsipan
- v. Urusan pemerintahan bidang pariwisata
- w. Urusan pemerintahan bidang pertanian
- x. Urusan pemerintahan bidang perdagangan
- y. Urusan pemerintahan bidang perindustrian

B. Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019

PKPT Inspektorat Daerah Kota Singkawang disusun dengan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat se-Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 7 s.d 9 November 2018, Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III serta rapat pembahasan PKPT Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada tanggal 19 Desember 2018.

Adapun ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019, meliputi:

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 - 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 - 2. Pelatihan dikantor sendiri; dan
 - 3. Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi :
 - 1. Probitiy Audit PBJ;
 - 2. Klinik konsultasi PBJ;
 - 3. Klinik konsultasi dana BOS; dan
 - 4. Pelaksanaan saber pungli.
- C. Kegiatan reuiu, meliputi:
 - 1. Reuiu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 2. Reuiu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 3. Reuiu KUA PPAS.
 - 4. Reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 5. Reuiu laporan kinerja;
 - 6. Reuiu penyerapan anggaran dan monitoring barang jasa; dan
 - 7. Reuiu DAK;
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
 - 1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, BPK RI dan BPKP Perwakilan Kalimantan Barat;

2. Monitoring dan evaluasi laporan gratifikasi;
 3. Monitoring dana Bantuan Operasional Sekolah;
 4. Monitoring Dana Kelurahan;
 5. Evaluasi AKIP OPD;
 6. Evaluasi SPIP;
 7. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
 8. Penilaian internal zona integritas;
 9. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
 10. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 11. Gelar Pengawasan Daerah;
 12. Evaluasi Anggaran dan Pengawasan; dan
 13. Penanganan Kasus Pengaduan.
- E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan
 2. Pemeriksaan Kinerja.

C. Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat pada Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019

Berdasarkan pembahasan PKPT tahun 2019 se-Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2018 di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Pontianak, Inspektorat Provinsi akan melakukan pengawasan yang diarahkan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adapun rencana Objek pemeriksaan yang akan diperiksa oleh Inspektorat Provinsi sebagai berikut :

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah adalah :
 - Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
 - BAPPEDA Kota Singkawang
 - Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
 - Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Singkawang
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
 - Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

D Personil

- d. 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- e. 2 (dua) orang fungsional P2UPD.
- f. 19 (sembilan belas) orang fungsional auditor.
- g. 8 (delapan) orang pelaksana.
- h. 4 (empat) orang tenaga kontrak.

E. Pendanaan

Biaya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019

F. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 ini disusun dan dibahas secara internal pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang serta telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Desember 2018



SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670717 198803 2 010



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk suatu tata pemerintahan yang baik serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probitiy Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 26);
17. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 32);
18. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat ITDA adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Singkawang.
8. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan :

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dalam menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat;
- c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- d. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota Singkawang;
- e. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat Daerah Kota Singkawang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dibiayai anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- d. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB IV
KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur :
 - a. kegiatan;
 - b. sasaran;
 - c. fokus; dan
 - d. jadwal pelaksanaan.
- (2) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun berbasis prioritas dan risiko.

BAB V
SASARAN PENGAWASAN

Pasal 8

Sasaran pengawasan Pemerintah Kota Singkawang adalah :

- a. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 disusun berbasis faktor risiko dan risk register;
- b. *Stakeholders* memahami program fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Teridentifikasinya kelemahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; dan
- d. Ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Laporan hasil pengawasan disusun berdasarkan kode etik dan standar pengawasan,serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut temuan hasil pengawasan yang meliputi kondisi dan rekomendasi temuan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan APIP disampaikan kepada Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 10

Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 198803 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019

RUANG LINGKUP, URAIAN KEGIATAN DAN FOKUS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2019

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang secara berkala dan komprehensif dengan fokus tertentu dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pada aspek pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi :

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- b. Pembinaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Pengelolaan Bantuan ; dan
- f. Pembangunan Fisik Konstruksi.

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai kinerja objek pemeriksaan secara utuh dan lengkap sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan, dengan menghimpun dan menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atas :

- ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan organisasi; dan
- efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran kegiatan yang menggunakan anggaran yang meliputi : ekonomi, efisien dan efektifitas. Tahun 2019 pemeriksaan kinerja difokuskan pada bidang kesehatan.

3. Pemeriksaan Kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat (yang disertai dengan bukti / identitas awal yang jelas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

4. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan / atau permintaan pejabat berwenang.

5. Kegiatan Reviu

Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, adapun kegiatan reviu yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Reviu RKPD Kota Singkawang;
- b. Reviu KUA PPAS;
- c. Reviu RKA OPD;
- d. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ;
- e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Reviu Lakip Pemerintah Kota Singkawang;
- g. Reviu DAK; dan

6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai salah satu bentuk pengarah dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Monitoring dan evaluasi dilakukan atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, dengan melihat unsur keselarasan kebijakan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi;
- b. Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- c. Monitoring Dana BOS;
- d. Monitoring Dana Kelurahan;
- e. Evaluasi AKIP OPD;

- f. Evaluasi SPIP;
 - g. Evaluasi Anggaran dan Pengawasan;
 - h. Verifikasi LHKASN;
 - i. Verifikasi Pelaporan Renaksi PPK Terintegrasi; dan
 - j. Penilaian Internal Zona Integritas.
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dengan menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, BPK RI dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- Merupakan Kegiatan pemutakhiran data atas hasil-hasil pengawasan berdasarkan temuan dan rekomendasi, baik yang sudah ditindaklanjuti ataupun yang belum ditindaklanjuti.
9. Gelar Pengawasan Daerah
- Kegiatan yang dilaksanakan sebagai evaluasi dan pembinaan kepada obyek pemeriksaan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi atas temuan pemeriksaan.
10. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- Merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan bagi APIP sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas, yang meliputi :
- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
 - b. Pelatihan di kantor sendiri.
11. Sosialisasi
- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait proses pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :
- a. Sosialisasi Pencegahan Korupsi;
 - b. Sosialisasi SPIP;
12. Probit Audit PBJ
- Adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Hal tersebut juga untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent, Deter* dan *Detect* sebagai *Early Warning System* atas proses pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

13. Klinik Konsultasi

Inspektorat Daerah Kota Singkawang membentuk klinik konsultasi PBJ dengan harapan keberadaan klinik ini bisa memberikan dampak yang signifikan dalam upaya memberikan peringatan dini dan pendampingan terhadap potensi permasalahan maupun kelalaian yang terjadi selama proses Pengadaan Barang Jasa mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan hingga serah terima, begitu juga dengan klinik Dana BOS bertujuan memberikan pelayanan dalam peringatan dini dan pendampingan dalam pengelolaan Dana BOS.

14. Kegiatan pengawasan lainnya menuju penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan integritas, dengan fokus kegiatan :

- a. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan;
- b. Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar;
- c. Rapat Koordinasi Kerjasama APIP dan APH;
- d. Penyelesaian Kerugian Negara.

WALIKOTA SINGKAWANG,

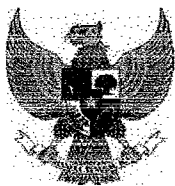
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 198803 1 004



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 700/321/Itda-Set-B TAHUN 2018**

**TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2019**

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Pontianak dan Rapat Pembahasan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probity Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
12. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 54);

Memperhatikan : Rapat Pembahasan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : PKPT Inspektorat Daerah disusun dengan mempertimbangkan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang Tahun 2019.
- KETIGA : PKPT Inspektorat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 198803 1 004

LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 700/321/Itda-Set-B
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
 DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2019

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2019

No	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Struktur	Jenis Pengawasan	Tahun Lingkup	Susunan Tim	Anggota Tetap	Anggota Honorer (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	JANUARI	IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEER REVIEW	2018	TIM 1, TIM 2, DAN TIM 3	5 HARI	-	01.01	02.01	3 LHR	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
2	FEBRUARI	IRBANWIL 1	- SDN 21 SINGKAWANG - SDN 22 SINGKAWANG - SDN 47 SINGKAWANG - SDN 48 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2018	TIM 1 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 2 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.02	04.02	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 1	- SDN 65 SINGKAWANG - SDN 66 SINGKAWANG - SDN 67 SINGKAWANG - SDN 68 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2018	TIM 2 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.02	04.02	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 7 SINGKAWANG - SDN 9 SINGKAWANG - SDN 11 SINGKAWANG - SMPN 14 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2018	TIM 3 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 2 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.02	04.02	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 87 SINGKAWANG - SDN 88 SINGKAWANG - SDN 89 SINGKAWANG - SMPN 7 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2018	TIM 4 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.02	04.02	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	AUDIT KINERJA	2018	TIM 5 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	20 HARI	Rp27.041.506	01.02	04.02	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056	02.02		-	3 LAPTOP, 2 PRINTER	
		3	MARET	IRBANWIL 1	- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DISDUKCAPIL - DINAS SOSIAL, PF DAN PA - INSPEKTORAT DAERAH	EVALUASI AKIP DAN EVALUASI SPIP	2018	TIM 1 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.03	04.03	8 LHE
IRBANWIL 2	- SEKRETARIAT DAERAH - DINAS KESEHATAN DAN KB - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BKPSDM			EVALUASI AKIP DAN EVALUASI SPIP	2018	TIM 2 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.03	04.03	8 LHE	4 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Tipe Kerja/SPD/Sektor	Jenis Pemantauan	Tahun	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	KMP	KPI	LHA	Peralatan	Keterangan
		IRBANWIL 3	- BKD - BAPPEDA - DINAS PU DAN PR - DINAS PARPORA	EVALUASI AKIP DAN EVALUASI SPIP	2018	TIM 3 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.03	04.03	8 LHE	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	- DINAS PERINDAGKOP DAN UKM - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - SEKRETARIAT DPRD - DPMTK	EVALUASI AKIP DAN EVALUASI SPIP	2018	TIM 4 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.03	04.03	8 LHE	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		INSPEKTUR	- DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN - DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - DINAS PERHUBUNGAN	EVALUASI AKIP DAN EVALUASI SPIP	2018	TIM 5 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.03	04.03	8 LHE	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU LAKIP PEMERINTAHAN DAERAH	2018	(PJ, WPJ, DALNIS, KT, 5 AT)	15 HARI	Rp15.009.100	01.03	04.03	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU LKPD	2018	(PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp15.778.500	01.03	04.03	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056	02.03	-	3 LAPTOP, 2 PRINTER		
4	APRIL	IRBANWIL 1	SEKRETARIAT DPRD	AUDIT KETAATAN	2018	TIM 4 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.04	04.04	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 1	DINAS DUKCAPIL	AUDIT KETAATAN	2018	TIM 1 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.04	04.04	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	DINAS KESEHATAN DAN KB	AUDIT KETAATAN	2018	TIM 2 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.04	04.04	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AUDIT PBJ	2018	TIM 3 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.04	04.04	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPK RI	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056	02.04	-	3 LAPTOP, 2 PRINTER		
		IRBANWIL 3	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ	2019	(PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	5 HARI	Rp6.530.538	03.04	04.04	1 LHR	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
5	MEI	IRBANWIL 1	- SDN 2 SINGKAWANG - SDN 92 SINGKAWANG - SDN 93 SINGKAWANG - SDN 94 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 1 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.05	04.05	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Sektor	Jenis Penugasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	JRP	LHA	Peralatan	Keterangan
		IRBANWIL 2	- SDN 53 SINGKAWANG - SDN 57 SINGKAWANG - SDN 58 SINGKAWANG - SMPN 6 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 2 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.05	04.05	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 8 SINGKAWANG - SDN 1C SINGKAWANG - SMPN TERBUKA - SMPN 18 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 4 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.05	04.05	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 71 SINGKAWANG - SDN 72 SINGKAWANG - SDN 73 SINGKAWANG - SDN 74 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2018	TIM 3 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.05	04.05	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 42 SINGKAWANG - SDN 43 SINGKAWANG - SDN 45 SINGKAWANG - SDN 46 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 5 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.05	04.05	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU RKPD	2018	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 5 AT	15 HARI	Rp14.540.500	01.05	04.05	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
6	JUNI	IRBANWIL 1	- SMPN 1 SINGKAWANG - SMPN 8 SINGKAWANG - SMPN 12 SINGKAWANG - SMPN 19 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 1 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.06	04.06	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 1	- SDN 45 SINGKAWANG - SDN 5C SINGKAWANG - SDN 51 SINGKAWANG - SMPN 5 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 4 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.06	04.06	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 25 SINGKAWANG - SDN 26 SINGKAWANG - SDN 28 SINGKAWANG - SMPN 10 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 2 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.06	04.06	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 14 SINGKAWANG - SDN 15 SINGKAWANG - SDN 16 SINGKAWANG - SMPN 4 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2018	TIM 3 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.06	04.06	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 3C SINGKAWANG - SDN 31 SINGKAWANG - SDN 32 SINGKAWANG - SMPN 9 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 5 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.06	04.06	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU KUA PPAS	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI		01.06	04.06	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITPROV KALBAR	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056		02.05	-	3 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Sektor	Jenis Penugasan	Tahun	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPI	LHA	Peralatan	Keterangan	
7	JULI	IRBANWIL 1	- SDN 3 SINGKAWANG - SDN 4 SINGKAWANG - SDN 5 SINGKAWANG - SDN 6 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 1 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.07	04.07	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER		
		IRBANWIL 1	- SDN 23 SINGKAWANG - SDN 24 SINGKAWANG - SDN 65 SINGKAWANG - SMPN 16 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 4 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.07	04.07	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER		
		IRBANWIL 2	- SDN 12 SINGKAWANG - SDN 27 SINGKAWANG - SDN 54 SINGKAWANG - SDN 55 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 2 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.07	04.07	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER		
		IRBANWIL 2	- SDN 61 SINGKAWANG - SDN 62 SINGKAWANG - SDN 63 SINGKAWANG - SDN 64 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2018	TIM 5 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.07	04.07	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER		
		IRBANWIL 3	- SDN 81 SINGKAWANG - SDN 82 SINGKAWANG - SDN 83 SINGKAWANG - SMPN 11 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 3 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.07	04.07	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER		
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPKP	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056	03.06				3 LAPTOP, 2 PRINTER	
		SEKRETARIS DAN IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	GELAR PENGAWASAN DAERAH	2019	-		Rp39.800.200					5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 3	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ	2019	(PJ, WPI, DALNIS, KT, 4 AT)	5 HARI	Rp6.530.538	03.07	04.07	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER		
		IRBANWIL	INSPEKTORAT DAERAH	EVALUASI ANGGARAN PENGAWASAN	2019			Rp27.041.506				1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
8	AGUSTUS	IRBANWIL 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT PBJ)	2018	TIM 1 (PJ, WPI, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.08	04.08	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER		
		IRBANWIL 2	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT PBJ)	2018	TIM 2 (PJ, WPI, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER		
		IRBANWIL 2	RSUD dr. ABDUL AZIZ	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT KETAATAN)	2018	TIM 4 (PJ, WPI, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER		
		IRBANWIL 3	BAPPEDA	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT KETAATAN)	2018	TIM 3 (PJ, WPI, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.08	04.08	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER		
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056	03.06				3 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Setor	Jenis Pengawasan	Tahun Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPI	LHA	Peralatan	Keterangan
9	SEPTEMBER	IRBANWIL 1	KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	MONITORING DANA KELURAHAN	2019	TIM 1 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp34.078.840	01.09	04.09	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 2	KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	MONITORING DANA KELURAHAN	2019	TIM 2 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp34.078.840	01.09	04.09	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	MONITORING DANA KELURAHAN	2019	TIM 4 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp34.078.840	01.09	04.09	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	MONITORING DANA KELURAHAN	2019	TIM 3 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp34.078.840	01.09	04.09	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 3	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	MONITORING DANA KELURAHAN	2019	TIM 5 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp34.078.840	01.09	04.09	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITPROV KALBAR	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056	03.06	-	3 LAPTOP, 2 PRINTER		
		IRBANWIL 1	- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS SOSIAL, PP DAN PA - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS DAGINKOP DAN UKM - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SEKRETARIAT DPRD - BPBD - KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	REVIU RKA	2020	(PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp18.557.933	01.09	04.09	9 LHR	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SEKRETARIAT DAERAH - DINAS KESEHATAN DAN KB - RSUD dr. ABDUL AZIZ - DINAS PERTANIAN - DINAS PERKIMTAN - DINAS KOMINFO - DINAS PERPUSTAKAAN - BKPSDM - KECAMATAN SINGKAWANG BARAT - KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	REVIU RKA	2020	(PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp18.557.933	01.09	04.09	10 LHR	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA - BADAN KEUANGAN DAERAH - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - DINAS PERHUBUNGAN - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA - BAPPEDA - BADAN KESBANGPOL - KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR - KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	REVIU RKA	2020	(PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp18.557.933	01.09	04.09	9 LHR	5 LAPTOP, 3 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SD/Sektor	Jenis Pengawasan	Tahun Pelaksanaan	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	JHA	Peralatan	Keterangan
10	OKTOBER	IRBANWIL 1	DINAS SOSIAL, PP DAN PA	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT KETAATAN)	2018	TIM 1 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.10	04.10	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 2	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT PBJ)	2018	TIM 2 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.10	04.10	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PERHUBUNGAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT PBJ)	2018	TIM 3 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.10	04.10	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DPMTK	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT KETAATAN)	2018	TIM 4 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.10	04.10	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPK RI	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056	03.06		-	3 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ	2019	(PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	5 HARI	Rp6.530.538	03.10	04.10	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
11	NOVEMBER	IRBANWIL 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT PBJ)	2018	TIM 1 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.11	04.11	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 1	DINAS PERINDAGKOP DAN UKM	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT KETAATAN)	2018	TIM 4 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.11	04.11	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	SEKRETARIAT DAERAH	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT KETAATAN)	2018	TIM 2 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.11	04.11	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	BKD	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT KETAATAN)	2018	TIM 3 (PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.11	04.11	1 LHP	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2019	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 HARI	Rp17.356.056	03.06		-	3 LAPTOP, 2 PRINTER	
12	DESEMBER	IRBANWIL 1	- SDN 1 SINGKAWANG - SDN 52 SINGKAWANG - SDN 91 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 1 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.12	04.12	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 56 SINGKAWANG - SDN 86 SINGKAWANG - SDN 90 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 4 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.12	04.12	4 LAPORAN MONITORING	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 17 SINGKAWANG - SDN 41 SINGKAWANG - SDN 44 SINGKAWANG - SMPN 17 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2018	TIM 3 (PJ, SUPERVISI, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.12	04.12	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPI	LHA	Peralatan	Keterangan
		IRBANWIL 3	- SDN 70 SINGKAWANG - SDN 84 SINGKAWANG - SDN 85 SINGKAWANG - SMPN 2 SINGKAWANG	MONITORING PENGELOLAAN DANA BOS	2019	TIM 5 (PJ, DALNIS, KT, 3 AT)	15 HARI	Rp27.041.506	01.12	04.12	4 LAPORAN MONITORING	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
		IRBANWIL 3	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ	2019	(PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT)	5 HARI	Rp6.530.538	03.12	04.12	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
13	JANUARI s.d MARET	SEKRETARIS	SATUAN PENDIDIKAN, SKPD DAN UPT PUSKESMAS/PUSTU, KELURAHAN	INVENTARISASI DAN EVALUASI LHKASN	2019	-	-	Rp13.822.200	01-03		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
14	JANUARI s.d JUNI	IRBANWIL DAN SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	SOSIALISASI SPIP	2019	-	-	Rp30.456.200	01-06		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
15	JANUARI s.d JUNI	IRBANWIL DAN SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI	2019	-	-	Rp61.742.500	01-06		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
16	JUNI s.d AGUSTUS	IRBANWIL DAN SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PMPRB	2019	PJ, WPJ, KT, 4 AT	-	Rp22.874.700	06-08		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
17	APRIL s.d JUNI	IRBANWIL DAN SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	ZONA INTEGRITAS	2019	PJ, WPJ, KT, 4 AT	-	Rp19.515.000	04-06		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
18	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL 1	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	KLINIK BOS	2019	-	-	Rp0	01-12		-	-	
19	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL 3	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	KLINIK KONSULTASI PBJ	2019	-	-	Rp0	01-12		-	-	
20	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	PENANGANAN KASUS PENGADUAN	KASUS PENGADUAN 1	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI	Rp34.884.333	01-12		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
21	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	PENANGANAN KASUS PENGADUAN	KASUS PENGADUAN 2	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI	Rp34.884.333	01-12		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
22	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	PENANGANAN KASUS PENGADUAN	KASUS PENGADUAN 3	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI	Rp34.884.333	01-12		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
23	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMERIKSAAN KHUSUS 1	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI	Rp30.871.250	01-12		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
24	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMERIKSAAN KHUSUS 2	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI	Rp30.871.250	01-12		1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	

No.	WALAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Setor	Jenis Pengawasan	Tahun Laju	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
25	MARET s.d DESEMBER	SEKRETARIS DAN IRBANWIL	APIP INSPEKTORAT DAERAH	PELATIHAN DIKANTOR SENDIRI	2019	-	-	Rp58.255.600	03-12	-	-	-	
26	MARET s.d DESEMBER	SEKRETARIS DAN IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	VERIFIKASI PELAPORAN RENAKSI PPK TERINTEGRASI	2019	PJ, WPJ, KT, 4 AT	-	Rp19.063.700	03-12	-	-	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
27	JUNI s.d NOVEMBER	SEKRETARIS DAN IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA	2019	TIM TPKD	-	Rp32.049.000	06-11	-	-	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
28	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU DAK	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI	Rp44.844.200	01-12	-	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
29	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	SKPD/UNIT KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ 1	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI	Rp27.041.506	01-12	-	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	
30	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	SKPD/UNIT KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ 2	2019	PJ, WPJ, DALNIS, KT, 4 AT	15 HARI	Rp27.041.506	01-12	-	1 LAPORAN	5 LAPTOP, 3 PRINTER	

WALIKOTA SINGKAWANG

ttt

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004

**PETA PENGAWASAN
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
 TAHUN 2019**

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Dinas - Dinas Daerah														X1 = Irban Wilayah 1
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											X1			X2 = Irban Wilayah 2
	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				X3										X3 = Irban Wilayah 3
	3. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								X2						X = Irban Wil 1,2 dan 3
	5. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja										X3				XY = Sekretariat
	6. Dinas Perhubungan										X3				Pemeriksaan Kasus = Jadwal Tentatif
	7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		X3												
	8. Dinas Lingkungan Hidup								X1						
	9. Satuan Polisi Pamong Praja														
	10. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan										X2				
	11. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM											X1			
	12. Dinas Kesehatan dan KB				X2										
	13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan														
	14. Dinas Komunikasi dan Informatika														
	15. Dinas Sosial, PP dan PA										X1				
	16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				X1										
	17. Sekretariat Daerah											X2			
	18. Sekretariat DPRD				X1										
	19. RSUD dr. Abdul Aziz								X2						
II	Lembaga Teknis Daerah														
	1. Badar														
	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								X3						
	b. Badan Keuangan Daerah											X3			

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM													
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
III	Kecamatan													
	a. Kecamatan Singkawang Utara										X1			
	b. Kecamatan Singkawang Barat										X2			
	c. Kecamatan Singkawang Tengah										X3			
	d. Kecamatan Singkawang Selatan										X2			
	e. Kecamatan Singkawang Timur										X3			
IV	Sekolah Dasar Negeri (SDN)													
	1 SD Negeri 1 Singkawang												X1	
	2 SD Negeri 2 Singkawang					X1								
	3 SD Negeri 3 Singkawang							X1						
	4 SD Negeri 4 Singkawang							X1						
	5 SD Negeri 5 Singkawang							X1						
	6 SD Negeri 6 Singkawang							X1						
	7 SD Negeri 7 Singkawang		X2											
	8 SD Negeri 8 Singkawang					X2								
	9 SD Negeri 9 Singkawang		X2											
	10 SD Negeri 10 Singkawang					X2								
	11 SD Negeri 11 Singkawang		X2											
	12 SD Negeri 12 Singkawang							X2						
	13 SD Negeri 14 Singkawang						X3							
	14 SD Negeri 15 Singkawang						X3							
	15 SD Negeri 16 Singkawang						X3							
	16 SD Negeri 17 Singkawang											X3		
	17 SD Negeri 21 Singkawang		X1											
	18 SD Negeri 22 Singkawang		X1											
	19 SD Negeri 23 Singkawang							X1						
	20 SD Negeri 24 Singkawang							X1						
	21 SD Negeri 25 Singkawang						X2							

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	52 SD Negeri 67 Singkawang		X1											
	53 SD Negeri 68 Singkawang		X1											
	54 SD Negeri 69 Singkawang							X1						
	55 SD Negeri 70 Singkawang												X3	
	56 SD Negeri 71 Singkawang				X3									
	57 SD Negeri 72 Singkawang				X3									
	58 SD Negeri 73 Singkawang				X3									
	59 SD Negeri 74 Singkawang				X3									
	60 SD Negeri 81 Singkawang							X3						
	61 SD Negeri 82 Singkawang							X3						
	62 SD Negeri 83 Singkawang							X3						
	63 SD Negeri 84 Singkawang												X3	
	64 SD Negeri 85 Singkawang												X3	
	65 SD Negeri 86 Singkawang												X2	
	66 SD Negeri 87 Singkawang		X2											
	67 SD Negeri 88 Singkawang		X2											
	68 SD Negeri 89 Singkawang		X2											
	69 SD Negeri 90 Singkawang												X2	
	70 SD Negeri 91 Singkawang												X1	
	71 SD Negeri 92 Singkawang						X1							
	72 SD Negeri 93 Singkawang						X1							
	73 SD Negeri 94 Singkawang						X1							
V	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N)													
	1 SMP Negeri 1 Singkawang						X1							
	2 SMP Negeri 2 Singkawang												X3	
	3 SMP Negeri 4 Singkawang							X3						
	4 SMP Negeri 5 Singkawang						X1							
	5 SMP Negeri 6 Singkawang						X2							
	6 SMP Negeri 7 Singkawang		X2											
	7 SMP Negeri 8 Singkawang						X1							

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XXIV	Sosialisasi Pencegahan Korupsi	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY							
XXV	Pelatihan di Kantor Sendiri			X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY	X, XY
XXVI	Gelar Pengawasan Daerah							X, XY						
XXVII	Monitoring Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut		XY	XY	XY		XY	XY	XY	XY	XY	XY		
XXVIII	Peer Review	X												
XXIX	Evaluasi Anggaran Pengawasan							X						

WALIKOTA SINGKAWANG

ltd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004